

**INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN IPS
DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:

Septi Dewi Susanti

NIM 13416241020

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

INTEGRASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA

Oleh:

Septi Dewi Susanti dan Dr. Nasiwan, M.Si

NIM 13416241020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta; 2) nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah guru IPS, kepala sekolah dan siswa. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada: 1) proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini karena dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan) dan memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi); 2) Nilai-nilai demokrasi yang terdiri dari menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan), serta memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Kata Kunci: Integrasi, Nilai-nilai Demokrasi, Pembelajaran IPS

A. PENDAHULUAN

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Somantri (2001: 44) tujuan dari pendidikan IPS pada tingkat sekolah, yaitu: 1) menumbuhkan nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama; 2) menekankan isi dan metode berpikir ilmuwan; serta 3) menekankan pada *inquiry*. Salah satu tujuan yang terdapat dalam pendidikan IPS yaitu menumbuhkan nilai kewarganegaraan, moral dan ideologi negara dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menjadi warga negara yang demokratis.

Tujuan pendidikan IPS berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, menjadi warga negara yang demokratis adalah keharusan bagi setiap individu. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Kehidupan masyarakat yang demokratis ialah memandang bahwa setiap warga negara mempunyai tingkat kesetaraan yang sama, tidak membedakan latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi ini merupakan salah satu cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Menurut Kladen (2014) menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi yaitu tindakan diskriminasi pada suatu oknum tertentu (pelanggaran HAM), kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, adanya geng klithih, kasus pemilu

dan tindakan intoleran (Kompas.com). Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi dilakukan pula oleh elit-elit pemerintahan serta aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupannya.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai demokrasi, salah satunya diupayakan melalui proses pendidikan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada lingkungan sekolah akan mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik dan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Dalam dunia pendidikan pelanggaran nilai-nilai demokrasi masih terjadi. Hal tersebut diungkapkan menurut Dananjaya (2012) bahwa berbagai tindakan meliputi kekerasan terhadap anak, perkelahian antar pelajar (tawuran), perundukan pada siswa, serta interaksi antara guru dan peserta didik yang tidak wajar dalam proses belajar mengajar yang tidak baik menjadikan reformasi pendidikan dikhianati (edukasi.kompas.com). Berdasarkan peristiwa diatas, dalam hal ini diperlukan upaya pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa dalam proses pembelajaran.

Adisusilo (2013: 62) menjelaskan bahwa pendidikan nilai mengantarkan siswa untuk mengenali dan menerapkan nilai. Dewasa ini dalam pelaksanaannya pendidikan nilai baru dilaksanakan pada tataran mengetahui nilai, belum sampai dilaksanakan pada tindakan nilai dimana dalam hal ini langkah yang penting adalah pada tindakan nilai. Pendidikan nilai harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran, seperti pada nilai demokrasi.

Salah satu mata pelajaran yang relevan untuk diterapkan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni (2007: 65) adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Melalui mata pelajaran IPS siswa diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, tanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh Rahmah (2014: 107) bahwa peran penting pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional serta menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Terciptanya warga negara yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis diperlukan keterlibatan aktif siswa yang mana akan menanamkan pada nilai-nilai demokrasi maupun ide-ide demokrasi dalam proses pembelajaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek pengetahuan.

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang diorganisir dalam ilmu sosial secara psikologis dan ilmiah. Secara akademis akan mengantarkan kearah terciptanya warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional, dalam menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya (*the public good citizenship*) (Wahidmurni, 2017: 18).

SMP Negeri 13 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang mempunyai visi dan misi yaitu menciptakan manajemen partisipasi pada seluruh warga sekolah dan menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif dan aktif. Adapun prinsip yang ada pada nilai-nilai demokrasi adalah partisipasi pada seluruh pihak dan menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan aktif.

SMP Negeri 13 Yogyakarta memiliki misi untuk menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Partisipasi merupakan salah satu nilai dalam nilai-nilai demokrasi, salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Integrasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 13 Yogyakarta”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Nilai-Nilai Demokrasi

a) Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut Ubaedillah (2011: 36) secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, gabungan dua kata *demos-cratos* (demokrasi) atau *demos-cratein* memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya dalam berpolitik.

Demokrasi menjamin hak setiap orang dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi menurut Dahl (1985: 8) adalah suatu kondisi dalam tertib politik di suatu negara yang mencakup dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Peran serta warga suatu negara menjadi hal yang penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi menjadi pilihan politik Indonesia sejak lahirnya sebuah negara dan dinilai sebagai metode politik pemerintahan yang sempurna.

Menurut Schumpeter (Effendi, 2014: 1) demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih pemimpin inilah yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi merupakan suatu cara dalam kegiatan politik dengan mengedepankan suara bersama tidak pada salah satu pihak saja.

b) Nilai-Nilai Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud apabila masyarakat menganut nilai-nilai demokrasi. Zamroni (2013: 19) menyebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan dan patriotisme. Sebagai salah satu nilai

demokrasi adalah kebebasan, yaitu bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kehidupan yang demokratis yang berpegang pada keadilan merupakan tujuan bersama setiap warga negara.

Nilai-nilai demokrasi diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan bangsa. Menurut Cholisin (2012: 89-90) menyebutkan nilai-nilai demokrasi antara lain: 1) menyelesaikan pertikaian secara damai; 2) menyelesaikan persoalan secara damai; 3) berpartisipasi dalam proses politik; 4) pengakuan terhadap nilai keanekaragaman; 5) menegakan keadilan (persamaan); dan 6) memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi).

Menurut Mayo (Sunarso, 2013: 84) demokrasi sebagai kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh rakyat didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik serta nilai-nilai demokrasi yaitu: 1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga; 2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah; 3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur; 4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; 5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan 6) menjamin tegaknya keadilan. Bentuk masyarakat demokratis akan kokoh apabila didalamnya dan nilai-nilai demokrasi.

c) Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi menurut Winataputra (2006: 12) merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, dan mengenalkan konsep, prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi diharapkan dapat membantu peserta didik mewujudkan warga negara yang sesuai pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan demokrasi mengacu pada nilai-nilai demokrasi untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ubaedillah (2011: 5) bahwa pendidikan demokrasi secara substantif adalah menyangkut sosialisasi,

diseminasi, dan aktual konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan yang meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, setiap individu tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Upaya mewujudkan warga negara yang demokratis salah satunya diupayakan melalui pendidikan demokrasi. Menurut Darmaningtyas (1999: 171) bahwa pendidikan demokrasi adalah mengembangkan kepribadian dan watak individu agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan harus mendasarkan pada prinsip kemanusiaan dan bertujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik, empati, toleransi dan memiliki pandangan sebagai warga negara, sehingga siswa dapat belajar mengenai pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi di sekolah menurut Zuriah (2009: 19) dilaksanakan pada ruang kelas yang menyenangkan untuk belajar dan berupaya menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi. Pada proses pembelajaran nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dengan menggunakan metode dan media yang sesuai. Dialog yang terjalin selama proses pembelajaran juga harus terjadi sehingga membuat peserta didik nyaman dalam pembelajaran berlangsung.

2. Hakikat Pembelajaran IPS

a) Pengertian Pembelajaran IPS

Pembelajaran IPS menurut Trianto (2010: 56) merupakan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dimana materi IPS disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik dan kebutuhan siswa agar pembelajaran IPS lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran IPS, diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman siswa pada permasalahan yang ada dalam kehidupan sekitarnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat.

Menurut Wahidmurni (2017: 17) menjelaskan bahwa pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang mengkaji secara sistematis dan terkoordinasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan

sosiologi serta materi yang sesuai dari humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam. IPS sebagai studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora adalah untuk meningkatkan kemampuan warga negara.

Dalam pelaksanaannya pembelajaran IPS mempunyai prinsip yang digunakan. Susanto (2014: 25) menjelaskan prinsip dalam pembelajaran IPS mencakup pada proses pembelajaran yang bermakna mengedepankan ide-ide yang diterapkan dalam kehidupan, pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran yang berbasis pada nilai, pembelajaran yang mencapai tujuannya dan pembelajaran aktif.

b) Tujuan Pembelajaran IPS

Tujuan pembelajaran IPS menurut Supardi (2011: 184), yaitu: 1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama; 2) menekankan pada berpikir ilmuwan; 3) menekankan reflektive inquiri; dan 4) mendidik siswa mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya. Melalui mata pelajaran IPS diharapkan peserta didik dapat belajar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendapat lain mengenai tujuan pembelajaran IPS dijelaskan menurut Zubaedi (2012: 287) bahwa pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, dan sosial. Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kehidupan masyarakat yang dinamis.

Menurut Wahidmurni (2017: 18) tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis yang dibutuhkan siswa untuk terlibat aktif dalam kehidupan publik. Orang-orang muda yang mempunyai pengetahuan, terampil serta meningkatkan cara hidup demokratis dan berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Pembelajaran IPS menjadi salah satu cara dalam mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik.

3. Integrasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS

Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS dapat diartikan sebagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses pembelajaran IPS untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi dan diharapkan dapat memperoleh kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam tingkah laku.

Pendidikan nilai menurut Hill (Adisusilo, 2012: 70) adalah mengantar siswa mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai, moral dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Proses pendidikan nilai dilaksanakan dengan mengetahui nilai-nilai, menginternalisasi dan melaksanakan pada perbuatan. Pendidikan nilai terintegrasi kedalam mata pelajaran.

Salah satu mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan nilai menurut Siregar (2011: 62) adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji materi dan mengaitkannya pada kondisi dan perkembangan masyarakat secara empiris. Salah satu tujuan dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah menjadikan sebagai warga negara yang baik.

Mulyana (2011: 191) menjelaskan bahwa melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan nilai, etika dan moral diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikannya pada konsep dan prinsip dalam proses pembelajaran. Nilai, etika dan moral tersebut diintegrasikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Peserta didik akan mempunyai daya saing global dalam menghadapi perkembangan zaman ini.

Menurut Susanto (2014: 38) bahwa pembelajaran IPS dalam penyampaian topik dilakukan melalui upaya mengintegrasikan dalam nilai dan sikap. Pembelajaran IPS yang baik adalah pembelajaran yang berbasis nilai. Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai demokrasi. Agar nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka nilai-nilai tersebut dapat

diajarkan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2015: 300) menjelaskan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan. Teknik *snowball sampling* digunakan untuk memberbanyak jumlah subjek apabila diperlukan informasi yang lebih mendalam. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran IPS, dan siswa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari kepala sekolah SMP, guru mata pelajaran IPS, dan siswa.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada proses belajar mengajar mata pelajaran IPS. Dalam penelitian ini untuk mengetahui integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP dan profil sekolah.

4. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang bertindak sebagai instrumen adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* akan mengamati proses pembelajaran di kelas. Moleong (2011: 168) menjelaskan manusia sebagai instrumen penelitian karena manusia sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka dalam penelitian dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Moleong (2011: 330) menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sugiyono (2015: 373) menjelaskan bahwa triangulasi sumber

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Miles & Huberman (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

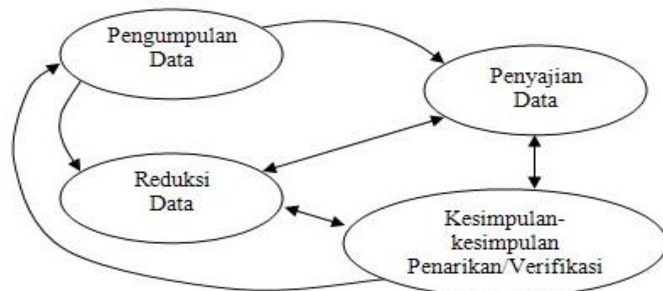
c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Milles & Hubberman, 2014 : 20

Gambar 1. Teknik Analisis Data Interaktif Model Miles dan Hubberman

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

a) Integrasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 13 Yogyakarta

Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS diartikan sebagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran diharapkan untuk dapat memperoleh kesadaran mengenai nilai demokrasi. Pada proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta integrasi nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam proses pembelajaran, hal ini karena dalam proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi.

Berdasar pada profil SMP Negeri 13 Yogyakarta yang ditujukan dalam visi misi sekolah, didalamnya terdapat salah satu nilai-nilai demokrasi. Visi yang dimiliki SMP Negeri 13 Yogyakarta yaitu

membentuk siswa yang berkarakter, beriman dan bertaqwa. Adapun misi sekolah terbagi menjadi tujuh poin. Pada poin ke-3 dan 6 mengandung salah satu nilai demokrasi. Pada poin ke-3 disebutkan *meningkatkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam bidang akademik dan non-akademik* dan pada poin ke-6 disebutkan *menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan*. Nilai partisipasi tersebut terdapat dalam salah satu nilai-nilai demokrasi, akan tetapi nilai tersebut tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Pada proses pembelajaran guru hanya mengajarkan siswa nilai karakter seperti berpikir, kreatif, inovatif, ketelitian dan rasa ingin tahu yang tinggi, sedangkan nilai-nilai demokrasi seperti menyelesaikan permasalahan secara damai, menyelesaikan pertikaian secara damai, berpartisipasi dalam politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakkan keadilan (persamaan) serta ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan tidak tercantum dalam dokumen RPP.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembelajaran IPS yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang direncanakan sebelum pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media dan metode yang digunakan serta penilaian dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tercantum dalam Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Berdasar pada dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), format penulisannya sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Komponen RPP menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 meliputi: (1) identitas sekolah; mata pelajaran dan kelas/semester; (2) standar kompetensi (SK); (3) kompetensi dasar (KD); (4) indikator; (5) tujuan pelajaran; (6) nilai karakter; (7) materi ajar; (8) alokasi waktu; (9) metode

pembelajaran; (10) kegiatan pembelajaran; (11) penilaian hasil belajar yang terdiri dari prosedur dan instrumen; dan (12) sumber belajar.

Pada tujuan pembelajaran yang tercantum didokumen RPP tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran IPS. Berdasar pada 10 dokumen RPP, menurut guru mapel IPS menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP terfokus pada pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD).

Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu dalam penyampaian materi IPS di dalam kelas agar memudahkan pada proses pembelajaran. Berdasar pada hasil 10 dokumen RPP peneliti tidak menemukan guru menggunakan media yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan guru adalah *power point*. Penggunaan media tersebut tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran.

Menurut hasil wawancara pada salah satu guru mapel IPS bahwa media yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah *power point* akan tetapi guru juga menggunakan barang-barang yang ada disekitarnya yang dapat mendukung sebagai media. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa-siswi kelas VII dan VIII menerangkan hal yang sama dengan pendapat guru IPS mengenai penggunaan media yang digunakan.

Pada dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut tercantum nilai karakter yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, akan tetapi nilai karakter tersebut tidak mengarah pada nilai karakter demokrasi. Nilai karakter yang dicantumkan antara lain: disiplin, hormat, tanggung jawab, tekun, ketelitian, empati, hormat, jujur, rasa ingin tahu, mandiri kreatif, percaya diri dan berorientasi pada tugas. Adapun nilai-nilai demokrasi yaitu meliputi: menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi, keadilan, keanekaragaman, menegakkan keadilan

(persamaan) dan memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi).

Pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta ini nilai-nilai demokrasi tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai kompetensi dasar dan tercantum dalam salah satu nilai demokrasi yaitu untuk memberikan ruang pada siswa dalam mengembangkan potensi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak diintegrasikan. Hal ini karena dalam proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi.

Pada proses pembelajaran komponen yang penting lainnya adalah materi. Materi ajar yang terdapat didalam 10 dokumen RPP telah menurut pada fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan serta telah ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam penilaian pembelajaran IPS ini tidak dilaksanakan atau tidak ada. Hal ini karena dalam proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi seperti menyelesaikan permasalahan secara damai, menyelesaikan pertikaian dengan damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan), dan memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) dalam pembelajaran IPS tidak ada di SMP Negeri 13 Yogyakarta ini tidak ada.

b) Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 13 Yogyakarta

Pada proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta nilai-nilai demokrasi diantaranya menyelesaikan permasalahan secara damai, menyelesaikan pertikaian secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan

(persamaan), serta memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Kehidupan yang demokratis menjadi cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokratis mengedepankan pada penyelesaian permasalahan secara damai. Nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dalam pendidikan melalui mata pelajaran yang relevan, yaitu IPS. Pada proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta salah satu nilai demokrasi ini tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Menyelesaikan permasalahan secara damai hanya disampaikan pada materi yang sesuai.

Bentuk kegiatan partisipasi yang melibatkan warga sekolah adalah pada kegiatan sekolah seperti pada kegiatan yang biasa dilakukan maupun pada kegiatan tertentu. Bentuk partisipasi dalam proses politik yang dilaksanakan pada kehidupan sekolah yaitu pada pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan ketua lainnya. Dimana seluruh warga sekolah ikut memberikan suara sebagai salah satu bentuk partisipasi.

Nilai partisipasi merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam nilai-nilai demokrasi, akan tetapi nilai tersebut tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Bentuk partisipasi dalam proses pembelajaran hanya dilaksanakan pada kegiatan diskusi dalam kelompok. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Proses partisipasi melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Nilai keadilan (persamaan) merupakan salah satu nilai yang terdapat pada nilai-nilai demokrasi. Berdasar pada dokumen RPP nilai keadilan ini tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Bentuk keadilan yang ada pada proses pembelajaran dan menurut dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.

Nilai-nilai demokrasi yaitu memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi). Nilai tersebut terdapat pada salah satu misi di SMP Negeri 13 Yogyakarta yaitu melaksanakan

pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Akan tetapi dalam proses pembelajaran tidak diintegrasikan sehingga misi tersebut tidak diintegrasikan dalam pembelajaran.

Nilai-nilai demokrasi dilaksanakan pula melalui kultur sekolah dengan adanya kegiatan pembiasaan dan peraturan sekolah. SMP Negeri 13 Yogyakarta mempunyai kultur sekolah yang berupaya menumbuhkan nilai demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada salah satu misi sekolah tersebut, yaitu meningkatkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam bidang akademik dan non akademik serta mengedepankan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dan Akan tetapi nilai tersebut tidak ada dalam proses pembelajaran, maupun dalam dokumen RPP.

Kebiasaan yang dilakukan sekolah salah satunya adalah musyawarah mufakat. Pada kegiatan musyawarah mufakat ini dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti pada pengakuan terhadap nilai keanekaragaman dan menegakan keadilan (persamaan). Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Kebiasaan lain yang dilaksanakan yaitu kegiatan kerja bakti merupakan kegiatan yang biasa dilaksanakan di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Kegiatan kerjabakti yang dilakukan yaitu dengan melibatkan guru dan siswa di lingkungan sekolah yang rutin dilaksanakan 1 kali dalam setiap minggunya, semua siswa dan guru maupun karyawan bersama-sama membersihkan sekolah.

Kegiatan tadarus Al-Quran dan menyanyikan lagu wajib nasional pada jam pertama merupakan kebiasaan yang dilaksanakan setiap harinya. Pada SMP Negeri 13 Yogyakarta mempunyai kelas khusus Olahraga (KKO) sedangkan kebiasaan yang dilaksanakan berbeda dengan kelas reguler. Pada kelas khusus olahraga (KKO) sebelum jam pertama dilaksanakan olahraga

kemudian dilaksanakan tadarus Al-Quran bagi yang muslim sedangkan untuk selain muslim menyesuaikan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional.

Kegiatan khas yang ada di SMP Negeri 13 Yogyakarta lainnya diantaranya adalah pembelajaran diluar kelas dan solat berjamaah. Kegiatan khas yang dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan kultur yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang muncul diantara kebersamaan, kebebasan, partisipasi, toleransi dan sikap saling mempercayai. Kegiatan yang ada, dilaksanakan pada semua warga sekolah.

Kegiatan pembelajaran diluar kelas merupakan upaya dalam menciptakan kultur yang demokratis. Setiap tahun sekolah selalu mengadakan pembelajaran diluar kelas sebagai sarana untuk menunjang dalam pembelajaran siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk saling merekatkan hubungan antar warga sekolah.

Kegiatan tersebut sebagai sarana untuk siswa dalam mempelajari segala yang ditemukan diluar kelas dan siswa akan bertambah pengetahuannya. Melalui kegiatan ini siswa dapat mengamati berbagai komponen masyarakat seperti interaksi antar anggota masyarakat, sosial, ekonomi maupun politik.

Sholat berjamaah dan sholat dhuha merupakan kegiatan khas yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Sholat berjamaah secara langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan nilai kesetaraan, partisipasi dan kebersamaan. Hal ini tidak membedakan guru dan siswa. Hal ini akan menumbuhkan kebermanfaatan baik untuk siswa maupun untuk guru dan warga sekolah, meski disini bukan dalam MTs atau Pesantren tetapi sebagai umat Islam kita harus dapat mengupayakan amalan agama dengan baik yang tentunya tidak mengganggu umat beragama.

Tata tertib siswa ini terbagi menjadi 4 bab. Pada bab 1 menjelaskan mengenai ketentuan umum, pada bab 2 menjelaskan pelanggaran dan sanksi, pada bab 3 menjelaskan mengenai penjelasan sanksi-sanksi dan pada bab 4 menjelaskan mengenai lain-lain. Tujuan dari tata tertib ini adalah

adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan menyejukan bagi siswa SMP Negeri 13 Yogyakarta yang berdasar pada nilai ketaqwaan, kesopanan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan dan lainnya agar mendukung kegiatan belajar yang efektif.

Pada point ke-3 pasal 7 yang membahas mengenai sopan santun pergaulan, yang ada didalam BAB 1 mengenai ketentuan umum, terdapat pasal yang berbunyi "*menghormati ide pikiran, pendapat, hak cipta maupun hak milik warga sekolah dan orang lain*" merupakan salah satu nilai demokrasi yang diterapkan pada tata tertib siswa di SMP Negeri 13 Yogyakarta tersebut.

Pada pasal 8 juga dijelaskan pula mengenai kegiatan keagamaan bahwa setiap siswa harus saling menghormati agama lain, hal ini merupakan cerminan dari salah satu nilai demokrasi. Tingkat sanksi atau hukuman disesuaikan dengan bentuk pelanggaran. Tim yang memantau akan tata tertib ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, Guru BK, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran, Guru Piket, Pelatihan dan seluruh karyawan SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam sekolah yaitu dilaksanakannya simulasi proses demokrasi disekolah yaitu pemilihan ketua OSIS. Pada setiap tahunnya kegiatan ini selalu dilaksanakan dengan tertib dan baik. Pemilihan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk simulasi pemilihan umum bagi siswa, antar peserta mempunyai hak memilih.

Pemberian penghargaan bagi guru maupun siswa yang berprestasi merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Pemberian penghargaan ini diberikan pada guru maupun siswa yang berprestasi. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghargaan dan saling menghargai karena sudah berpartisipasi serta memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi).

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a) Integrasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Di SMP

Negeri 13 Yogyakarta

Pendidikan nilai menurut Hill (Adisusilo, 2012: 70) adalah mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai moral dan keyakinan agama, untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Penanaman nilai atau proses pembentukan karakter dapat dilakukan dengan memahami atau mengetahui nilai-nilai, menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan melaksanakan nilai kedalam tingkah laku maupun perbuatan. Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS diartikan sebagai usaha untuk menggabungkan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran untuk memperoleh kesadaran mengenai nilai demokrasi. Pada proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta nilai-nilai demokrasi tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran, hal ini karena dalam proses pembelajaran tersebut tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Begitu pula pada materi maupun metode yang digunakan oleh guru, tidak mengarah pada integrasi nilai-nilai demokrasi.

Adapun nilai-nilai demokrasi menurut Cholisin (2012: 89-90) meliputi 1) menyelesaikan pertikaian secara damai; 2) menyelesaikan persoalan secara damai; 3) berpartisipasi dalam proses politik; 4) pengakuan terhadap nilai keanekaragaman; 5) menegakkan keadilan (persamaan) dan 6) memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi).

Menurut Mulyana (2011: 191) melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan nilai, etika dan moral diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikannya pada pembelajaran. Berdasar observasi pada kelas VII dan VIII dalam proses pembelajaran IPS, guru tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi tersebut kedalam proses pembelajaran.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembelajaran IPS yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Perencanaan pembelajaran menurut Supardan (205: 173) merupakan proses yang

direncanakan akan dilaksanakan maupun dikoreksi sebelum pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media dan metode yang digunakan serta penilaian dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasar pada dokumen RPP nilai-nilai yang dicantumkan tidak mengarah pada nilai-nilai demokrasi.

Tujuan pembelajaran yang dalam proses pembelajaran tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran IPS. Berdasar pada 10 dokumen RPP, bahwa tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP terfokus pada pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD).

Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu metode diskusi, presentasi dan penugasan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS tidak mendukung proses integrasi nilai-nilai demokrasi seperti dalam penyelesaian persoalan secara damai, berpartisipasi secara politik, keadilan (persamaan), keanekaragaman dan pengembangan pengetahuan.

Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu dalam penyampaian materi IPS di dalam kelas agar memudahkan pada proses pembelajaran. Berdasar pada 10 dokumen RPP tidak ditemukan penggunaan media yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah *power point*. Penggunaan media tersebut tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran.

Nilai karakter yang terdapat dalam dokumen RPP tidak mengarah pada karakter demokrasi. Karakter yang dicantumkan antara lain disiplin, hormat, tanggung jawab, tekun, ketelitian, empati, hormat, jujur, rasa ingin tahu, mandiri kreatif, percaya diri dan berorientasi pada tugas. Adapun nilai demokrasi seperti menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi, keadilan, keanekaragaman, menegakkan keadilan (persamaan) dan

memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak tercantum.

Pelaksanaan pembelajaran menurut Hamalik (2009: 124) merupakan proses terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Yogyakarta ini tidak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini karena dalam proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran.

Pada pelaksanaan pembelajaran komponen yang penting adalah materi. Materi ajar yang terdapat didalam 10 dokumen RPP telah menurut pada fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan serta telah ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran IPS di kelas VII dan VIII tidak berisikan pada kajian mengenai demokrasi.

Penilaian pembelajaran menurut Jihad (2009: 54) adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi objektif, berkelanjutan dan menyeluruh mengenai proses dan hasil belajar yang dicapai siswa. Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam penilaian dalam pembelajaran IPS tidak ada di SMP Negeri 13 Yogyakarta ini tidak ada. Hal ini karena dalam proses pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Kegiatan hasil belajar dapat berupa pencapaian pada aspek kognitif.

Peran penting pembelajaran IPS menurut Rahmah (2014: 107) yaitu membangun identitas nasional serta menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Terciptanya warga negara yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis diperlukan keterlibatan aktif siswa yang mana akan menekankan pada nilai-nilai demokrasi maupun ide-ide demokrasi dalam proses

pembelajaran, akan tetapi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak termuat nilai-nilai demokrasi.

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang diberikan di sekolah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang diorganisir dalam ilmu sosial secara psikologis dan ilmiah. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional, dalam menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya (*the public good citizenship*) (Wahidmurni, 2017: 18).

Berdasar pada profil sekolah yang ditunjukkan pada visi dan misi sekolah menyebutkan bahwa membentuk siswa yang berkarakter, beriman dan bertaqwa. Pada misi sekolah disebutkan bahwa menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan. Nilai partisipasi merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam nilai-nilai demokrasi, akan tetapi nilai tersebut tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

b) Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 13 Yogyakarta

Nilai-nilai demokrasi menurut Cholisin (2012: 89-90) antara lain: 1) menyelesaikan pertikaian secara damai; 2) menyelesaikan persoalan secara damai; 3) berpartisipasi dalam proses politik; 4) pengakuan terhadap nilai keanekaragaman; 5) menegakan keadilan (Persamaan); 6) memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi). Nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran di SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Penanaman nilai memberikan makna luas dalam meningkatkan kualitas dan perkembangan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai sarana dalam upaya penanaman nilai yang berpengaruh pada perkembangan siswa.

Penanaman nilai ini terintegrasi pada mata pelajaran semua mata pelajaran, termasuk pada mata pelajaran IPS.

Nilai-nilai demokrasi seperti menyelesaikan pertikaian secara damai merupakan nilai yang terdapat pada nilai-nilai demokrasi. Dimana dalam kehidupan yang demokrasi, apabila terdapat masalah atau pertikaian selalu diselesaikan secara damai. Nilai tersebut dalam proses pembelajaran tidak diintegrasikan dalam pembelajaran. Nilai tersebut hanya disampaikan pada materi yang sesuai pada materi.

Berpartisipasi dalam proses politik, berdasar pada salah satu misi yang terdapat di SMP Negeri 13 Yogyakarta, poin-7 disebutkan bahwa misi sekolah yaitu menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan, kegiatan partisipasi tersebut dilakukan agar semua warga sekolah dapat berinteraksi dan komunikasi, bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu pada kegiatan sekolah dan berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan lainnya yang melibatkan partisipasi dalam berpolitik.

Keadilan atau persamaan dalam proses pembelajaran merupakan persamaan untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Masing-masing siswa mempunyai hak dalam pembelajaran tidak membedakan mengenai latarbelakang maupun status sosialnya. Nilai keadilan (persamaan) tidak tercantum pada dokumen RPP.

Keanekaragaman yang terdapat dalam proses pembelajaran terkait pada kondisi sosial, latarbelakang sosial dimaknai bahwa dalam kehidupan yang demokratis diperlukan adanya toleransi, saling menghargai, dan bekerjasama. Dalam proses pembelajaran nilai tersebut dilaksanakan dalam kegiatan diskusi, akan tetapi tidak terdapat dalam dokumen RPP.

Berdasar pada salah satu misi yang terdapat di SMP Negeri 13 Yogyakarta, poin-7 disebutkan bahwa misi sekolah yaitu menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan. Nilai partisipasi merupakan salah satu nilai yang

terdapat dalam nilai-nilai demokrasi, akan tetapi nilai tersebut tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Partisipasi sebagai bentuk kontribusi yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Proses partisipasi melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Nilai partisipasi oleh warga sekolah ditunjukkan pada keikutsertaannya dalam kelompok dan mengikuti segala bentuk aturan serta kegiatan yang dilaksanakan sekolah.

Pendidikan demokrasi menurut Zamroni (2013: 22-23) merupakan teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Suatu upaya sistematis yang dilakukan mengedepankan pada nilai-nilai demokrasi dapat dilaksanakan pula melalui kultur sekolah dengan diperlukan adanya kebiasaan, peraturan sekolah dan kegiatan pembelajaran. SMP Negeri 13 Yogyakarta mempunyai kultur sekolah yang berupaya menmbuhkan nilai demokratis. Hal ini dapat dilihat pula pada salah satu misi sekolah, yaitu mengedepankan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a) Pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta nilai-nilai demokrasi tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini karena dalam proses pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran tidak dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi ini meliputi: menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan), serta memajukan ilmu pengetahuan

(mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi). Meski pada visi-misi sekolah terdapat nilai demokrasi, akan tetapi tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

- b) Nilai-nilai demokrasi seperti menyelesaikan pertikaian secara damai, menyelesaikan persoalan secara damai, berpartisipasi dalam proses politik, pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, menegakan keadilan (persamaan), serta memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi, kreativitas dan inovasi) tidak diintegrasikan dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta.

2. Saran

- a. Sebaiknya integrasi nilai-nilai demokrasi dapat diupayakan dalam proses pembelajaran IPS, mengingat bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran IPS adalah membantu siswa menjadi warga negara yang baik dengan menekankan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran.
- b. Sebaiknya nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan sebagai salah satu penanaman nilai dalam pembelajaran IPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo. (2012). *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivistik dan VCT sebagai inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Avianto, S. (2013). Penanaman Nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013). *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Solo, Solo.
- Cholisin & Nasiwan. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional* diakses pada

<https://asefts63.files.wordpress.com/2011/01/permendiknas-no-22tahun2006-standar-isi.pdf> tanggal 3 Maret 2017 pukul 09.30 WIB.

- Effendi, T. N. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrohman, P., Suryana, A. & Fitriani, F.(2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hamalik, O. (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Illahi, M. T. (2012). *Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vocational Skill*. Yogyakarta: Diva Press.
- Jihad, A. & Haris, A. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Press.
- Madjid, A. (2008). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L .J .(2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, R. (2011). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Permendiknas. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007* diakses pada http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/06/Permendikbud_Tahun2016_Nomor_41_Lampirn.pdf tanggal 3 Maret 2017 pukul 10.01 WIB.
- Raharjo & Solihatin, E. (2009). *Cooperative Learning (Analisis Model Pembelajaran IPS)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmah, H. (2014). *Pengembangan Profesi Pendidikan IPS*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Bandung: Kencana.
- Sapriya. (2011). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siregar, E & Nera, H. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan RnD*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulistiyorini, A. (2014). *Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA se Kecamatan Depok Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Sumpeno, W. (2009). *Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training-Design dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarso. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan: Pkn Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.

- Supardan, D. (2015). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi Dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supardi. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Susanto, A.(2014). *Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ubaedillah & Rozak, A. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Demokrasi (Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah.
- Wahidmurni. (2017). *Metodologi Pembelajaran IPS Pengembangan Proses Pembelajaran IPS Di Sekolah atau Madrasah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Winataputra, U.S. (2006). *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Ditnaga Dirjen.
- Zaini, H. (2008). *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: CTSD.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan Demokrasi dan Demokrasi dalam Transisi, Prakondisi Menuju Era Global*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- _____. (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

